

## Kamus Bahasa Jawa-Indonesia Digital Diluncurkan

**YOGYA (KR)** - Sebagai puncak rangkaian acara Bulan Bahasa dan Sastra 2022, Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar acara peluncuran Kamus Bahasa Jawa-Indonesia Digital di Ruang Sutan Takdir Alisjahbana, Balai Bahasa DIY, Senin (31/10) secara luring dan daring. Setelah itu diadakan seminar bertema 'Peran Kamus Digital untuk Pengembangan Bahasa'.

Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Drs Imam Budi Utomo MHum membuka kegiatan sekaligus meluncurkan Kamus Bahasa Jawa-Indonesia Digital tersebut melalui ruang virtual.

Adapun seminar menghadirkan KRT Kintoko Sri Soedarmo dari Panitrapura Kraton Yogyakarta dan Bandung Mawardi dari Kabut Institut.

Acara ini diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan, akademisi, prak-

tisi, pemangku kepentingan, maupun media secara langsung. Masyarakat dapat mengikuti secara virtual melalui zoom dan youtube.

Kepala Balai Bahasa DIY Dra Dwi Pratiwi MPd menuturkan, Kamus Bahasa Jawa-Indonesia versi digital merupakan bagian dari inovasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu perkembangan dunia perkamusan dan secara lebih luas lagi perkembangan bahasa.

"Kamus tidak selalu berbasis kertas," ujarnya. Menurut Dwi, terbitnya

Kamus Bahasa Jawa-Indonesia digital diharapkan mampu melengkapi kamus versi cetak. Itu sebabnya, Balai Bahasa DIY sebagai institusi di bawah Kemdikbudristek selalu terbuka. Balai Bahasa DIY tidak menutup informasi untuk memutarhkirkan kosakata bahasa Jawa.

"Kami menunggu saran, kritikan, kontribusi untuk pengayaan kosakata Jawa, ke depan pengembangannya seperti apa," kata Dwi Pratiwi.

Imam Budi Utomo mengapresiasi inovasi ini. Menurutnya, peluncuran

Kamus Bahasa Jawa-Indonesia digital akan memperluas jangkauan dan mempercepat akses terutama bagi kalangan generasi muda.

"Harga Kamus Bahasa Jawa-Indonesia versi cetak bisa mencapai puluhan sampai ratusan ribu rupiah. Dengan versi digital bisa benar-benar diak-

ses tanpa biaya. Inilah salah satu bentuk kemurahan dari Revolusi Industri 4.0," katanya.

Imam berharap, dengan digitalisasi masyarakat lebih mudah mengaksesnya secara daring, tidak harus datang ke kantor Balai Bahasa DIY. Selain itu, masyarakat juga bisa ikut terlibat memperkaya

kosakata atau memberikan pemahaman terhadap definisi kosakata bahasa Jawa. **(Dev)-f**



KR-Devid Permana  
**Peluncuran Kamus Bahasa Jawa-Indonesia digital.**

## Siaran Digital, Jawaban Era Digitalisasi

**YOGYA (KR)** - Dalam menjawab tantangan era digitalisasi, TVRI Stasiun Yogyakarta harus dapat mengisi slot yang tersedia dengan konten yang berkualitas sekaligus memenuhi fungsi kepublikan. Hal tersebut disampaikan Johan Setiawan, Kepala Stasiun TVRI Yogyakarta, saat berkunjung ke Kantor PT BP Kedaualatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta, Selasa (1/11). Kunjungan diterima Direktur Utama PT BP Kedaualatan Rakyat M Wirmon Samawi SE MIB bersama Prof Dr Inajati Adrisijanti (Komisaris Utama) dan Direktur Keuangan (Direktur Keuangan) Imam Satriadi SH.

Turut hadir jajaran TVRI Stasiun Yogyakarta, Meidiana Poncowati (Ketua Tim Program TVRI), Saktiono

Wahyujati (Ketua Tim Berita) dan Hary Susanto (Ketua Tim TVRI Online).

Tantangan era digitalisasi ini, menurut Johan ditandai dengan beralihnya siaran ke televisi digital di Indonesia yang hingga saat ini terus dikampanyekan.

"Pada kesempatan ini kami juga membawa serta Modi atau Maskot Digital Indonesia yang selama ini dikenal untuk sosialisasi siaran digital kepada masyarakat," kata Johan.

Selain berbincang seputar transformasi industri media serta perkembangan siaran digital yang saat ini masih terus disosialisasikan ke masyarakat, kunjungan ini juga dalam rangka perkenalan bagi Johan yang beberapa bulan lalu mulai bertugas di TVRI Stasiun Yogyakarta. **(Sal)-f**



KR-Surya Adi Lesmana  
**Jajaran TVRI Stasiun Yogyakarta bersama jajaran Direksi dan Komisaris Kedaualatan Rakyat.**

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
KANTOR CABANG SLEMAN  
Jalan Bhayangkara No. 18 Sleman 55514  
Telepon : (0274) 868418, 868406, 868353, 868842  
Facsimile : (0274) 868826 Telex : 25200BRISMN IA

**PENGUMUMAN KEDUA  
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**

Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sleman akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet (Closed Bidding) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta terhadap agunan debitur atas nama :

**1. Fitri Yuliana**  
1 (satu) bidang tanah seluas 337 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana tertuang dalam SHGB No. 00775/Sukoharjo, tanggal 30-06-2015, atas nama Franciscus Asisi Sugihyawan terletak di Perum Griya Perwita Wisata, Jalan Pakis No.13-14 Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  
• Nilai limit Rp 1.814.500.000,-  
• Jaminan Penawaran Lelang Rp 362.900.000,-

**Pelaksanaan Lelang :**  
Hari / Tanggal : Rabu / 16 November 2022  
Batas Akhir Penawaran : 10.00 WIB (Waktu Server aplikasi lelang internet)  
Alamat Domain : www.lelang.go.id  
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No.11 Yogyakarta

Penunjukan Pemegang : setelah batas akhir penawaran  
Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server

**Syarat dan Ketentuan Lelang :**

- Cara penawaran dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang (Closed Bidding) yang diakses pada sistem domain www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
- Pendaftaran calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun Badan Usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan Akun pada Aplikasi Lelang melalui Internet pada alamat domain yang disebut angka 1 (satu) hari sebelum lelang dan mengunggah softcopy (Scan) KTP, NPWP (Ekstensi File .jpg atau .png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
- Uang jaminan lelang  
Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Jumlah atau nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan lelang yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang dan disetor sekaligus (bukan dicicil).  
b. Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.  
c. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang, nomor Virtual Account (VA) akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain di atas setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan Valid / sah.
- Penawaran Lelang  
Penawaran Lelang dimulai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut di atas dan harga penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang tertinggi.
- Pengembalian uang jaminan  
a. Pengembalian uang jaminan lelang kepada peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pelaksanaan lelang melalui pemindahbukuan ke rekening yang telah didaftarkan peserta lelang.  
b. Ketentuan waktu pengembalian uang jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan pendaftaran nomor dan nama rekening oleh peserta lelang atau keterlambatan pengembalian karena mekanisme perbankan.  
c. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.
- Pelunasan lelang  
Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan biaya lelang sebesar 2% ditunjuk ke nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas maka uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara. Pemenang lelang akan dikenakan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
- Obyek lelang dijual dalam keadaan apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibelinya.
- Karena satu hal pihak penjual dan atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang dan pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun itu kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang KPKNL Yogyakarta dan kantor pusat DJKN
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai obyek lelang dapat menghubungi :  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sleman Telp. (0274) 868418, 868406 atau KPKNL Yogyakarta Telp. (0274) 544091.

Sleman, 2 November 2022  
**PT. BRI (Persero), Tbk. Kanca Sleman**  
Ttd  
Pemimpin Cabang

## MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN DPRD KOTA YOGYAKARTA

### Garda Terdepan, Pastikan Semua Fungsi Berjalan



KR-Istimewa  
**Prosesi pengucapan sumpah dan janji Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta pada 2019 silam.**

**YOGYA (KR)** - Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam arah pembangunan di suatu daerah. Sebagai mitra eksekutif, DPRD memiliki tiga fungsi utama yakni pembentukan peraturan daerah (perda), pengawasan serta penganggaran. Untuk menjalankan fungsi tersebut, dilengkapi alat kelengkapan yang sifatnya tetap. Unsur paling utama dalam alat kelengkapan dewan ialah Pimpinan. Khusus di DPRD

Kota Yogyakarta, terdiri dari tiga wakil yakni Ketua yang dijabat H Danang Rudyatmoko dari Fraksi PDI Perjuangan, serta dua orang wakil yakni HM Fursan SE dari Fraksi PAN sebagai Wakil Ketua I, dan Dhian Novitasari SPd dari Fraksi Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua II. Sebagai garda terdepan maka Pimpinan DPRD harus memastikan semua tugas pokok dan fungsi dari lembaga dewan mampu berjalan sesuai koridor.

"Kita sudah memiliki tata tertib sebagai acuan serta pedoman kerja yang sudah disepakati bersama. Itu menjadi dasar kami untuk saling mengingatkan di internal dewan. Dan sepanjang tahun ini, alhamdulillah semua dapat berjalan dengan baik," tandas Danang.

Salah satu tugas dan wewenang Pimpinan DPRD, imbuh Danang ialah melaksanakan keputusan Badan Kehormatan tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota dewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Danang bersyukur, selama ini belum ada keputusan dari Badan Kehormatan atas sanksi bagi para anggotanya.

### Jalin Hubungan Harmonis untuk Sinergi Pembangunan



KR-Istimewa  
**H Danang Rudyatmoko, HM Fursan SE, Dhian Novitasari SPd**

**YOGYA (KR)** - Pimpinan DPRD tidak bisa dipisahkan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu strategi yang digulirkan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta ialah menjalin hubungan harmonis. Tidak hanya terhadap unsur pimpinan di internal dewan melainkan dengan kepala daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) tingkat Kota Yogyakarta. Hubungan harmonis tersebut tidak lain ialah guna menjaga sinergi pembangunan di daerah. Terlebih Kota Yogyakarta merupakan daerah dengan tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, di samping sebagai ibu kota provinsi DIY. Dengan begitu antar pimpinan daerah baik di tingkat eksekutif, legislatif serta yudikatif perlu terjalin hubungan yang harmonis.

"Forkompimda di Kota Yogyakarta ini hubungannya berjalan dengan baik. Harmonisasi ini terus kami bangun, tidak hanya dalam komunikasi informal melainkan juga formal," ungkap HM Fursan. Senada juga disampaikan Dhian Novitasari. Menurutnya, dengan hubungan yang harmonis tersebut maka kemana arah tujuan pembangunan di Kota Yogyakarta bisa lebih sinergis. Sebagai contoh, setiap menggelar sidang paripurna sebagai rapat tertinggi yang ada di dewan, Pimpinan DPRD selalu melibatkan unsur Forkompimda untuk hadir. Baik dari pihak kepolisian, TNI, kejaksaan maupun pengadilan.

"Dari situ semua bisa mengetahui setiap keputusan yang kami tetapkan. Sehingga kemana arah pembangunan di kota ini bisa dipahami bersama. Harapannya ketika ada persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, maka semua unsur pimpinan daerah bisa bersinergi bersama dalam menuntaskan persoalan itu," paparnya. **(Dhi)-f**

Secara internal, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sesuai diatur dalam tata tertib di antaranya memimpin agenda rapat serta menyimpulkannya untuk diambil keputusan, menyusun rencana kerja pimpinan, membagi tugas antara ketua dan wakil ketua, mengkoordinasikan kegiatan tiap alat kelengkapan serta menyampaikan laporan kinerja yang digelar secara khusus melalui sidang paripurna.

"Ketugasan internal itu sudah menjadi agenda rutin. Bahkan ketika ada persoalan yang membutuhkan solusi segera, kami para pimpinan langsung melakukan musyawarah. **(Dhi)-f**



KR-Ardhi Wahdan  
**Unsur Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta melakukan salam komando.**